TUGAS FILSAFAT MORAL
ANALISA KASUS KORUPSI MASSAL DPRD KOTA MALANG

Dosen Pengampu : Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum

Disusun Oleh :

Sunardi

51416069

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN
MADIUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Moral.
2. Rekan – rekan yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam proses pembuatan makalah ini.

Saya berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa menjadi referensi pembaca dalam bertindak di kehidupan sehari-hari.

Saya yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Madiun, 28 November 2018

Penyusun

ABSTRAK

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan wewenang yang dimiliki maupun kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tujuan dari paper ini adalah untuk melihat kasus korupsi massal yang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dari sudut pandang tindakan manusia. Teori yang digunakan dalam pembahasan paper ini adalah *Actus Hominis* dan *Actus Humanus*, Asas Tahu Mau Bebas, Hati Nurani, dan Prinsip Refleksif *Bonum Communae Bono Privato Preferri Debet*.

Kata Kunci : Korupsi, Tindakan Manusia, *Actus Hominis* dan *Actus Humanus*, Asas Tahu Mau Bebas, Hati Nurani, serta *Bonum Communae Bono Privato Preferri Debet*.

Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

A. Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan seseorang ataupun kelompok yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Menurut Pengertian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan wewenang yang dimiliki maupun kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi menjadi penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik sehingga perlu ada perhatian dan penanganan secara khusus. Korupsi mempunyai ciri - ciri atau karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan tipu daya muslihat, ketidakjujuran, pemanfaatan kedudukan untuk penyelewengan, penyuapan dan penyembunyian suatu kenyataan. Korupsi bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan, korupsi bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, juga bukan faktor kebetulan, Melainkan suatu tingkah laku yang dilandasi niat atau motivasi tertentu.

Kasus korupsi pasti ada di setiap negara, namun dengan kadar yang berbeda-beda. Kasus korupsi sangat tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sekalipun telah dibentuk badan bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun nyatanya kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi, bahkan semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari anggota DPR, ketua partai, kepala sekolah, wali kota, bahkan ketua KPK pun pernah (bahkan sering) terjerat kasus korupsi. Sangat memprihatinkan, di mana seharusnya para pemimpin itu menjadi contoh

yang dapat dijadikan teladan bagi para masyarakat malah seperti berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan uang rakyat.

Korupsi memberikan dampak yang sangat buruk karena dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan para pejabat yang diangkat atau dinaikkan jabatannya bukan karena prestasi. Hal-hal semacam ini akan membuat makin banyak pejabat yang memiliki jiwa koruptor.

B. Studi Kasus

Dikutip dari situs berita online KOMPAS.com — Terdapat sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut mengakibatkan proses pembangunan di Kota Malang terancam lumpuh total. Korupsi massal terduga terjerat dugaan kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Moch Arief Wicaksono (Mantan Ketua DPRD Kota Malang), menjadi yang pertama kali dijabarkan penjara dengan vonis 5 tahun.

Mantan Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono ditangkap pertama oleh penyidik KPK. Moch Arief Wicaksono terduga menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut. Penyidik melakukan pengembangan perkara, kemudian menemukan bahwa suap juga dilakukan oleh belasan anggota Dewan. Pada Senin (23/7/2018), KPK melimpahkan 18 berkas beserta bukti bukti kasus terkait suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun 2015. “Hari ini (Senin) dilakukan pelimpahan barang bukti dan 18 tersangka terlibat suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ke penuntutan (tahap 2),” ujar Febri Diansyah (Juru Bicara KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/7/2018).

KPK bergerak cepat. Setelah menetapkan 18 pejabat menjadi tersangka, pada hari Senin (3/9.2018), KPK kembali menetapkan 22 anggota menjadi tersangka. Gedung DPRD Kota Malang sunyi (sepi penghuni). 41 dari 45 anggota dewan terjerat kasus korupsi dan terpaksa menjadi pesakitan di rutan Kota Surabaya. Anggota dewan tersisa empat orang, Yakni Abdurrochman (PKB) selalu wakil ketua dan pimpinan dewan satu-satunya, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P) dan Tutuk Haryani (PDI-P). Satu lagi anggota dewan hasil PAW dari Yaqud Ananda Gudban yang sudah menjadi terdakwa, yaitu Nirma Cris Desinidya dari parta Hanura. Kondisi tersebut membuat agenda di DPRD mandeg. Salah satunya adalah sidang paripurna LKPI akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013 - 2018, sidang paripurna pengesahan P-APBD tahun anggaran 2018 dan pembahasan APBD induk tahun anggaran 2019. "APBD-P kemarin baru mulai. Belum sampai detil. Masih nunggu di-Bamus-kan, padahal sudah dijadwalkan, dan akhirnya harus ditunda," katanya di gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/9/2018). Padahal, menurutnya, Bulan September ini P-APBD tahun anggaran 2018 harusnya sudah bisa disahkan. "Tragsinya, kasus tersebut berdampak pada pelantikan Wali Kota Malang terpilih pada tanggal 22 September 2-18 nanti, akan terancam gagal. Karena tidak kuorum," katanya. Kendati begitu, pelayanan di gedung DPRD Kota Malang tetap berjalan.

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya) dengan judul "Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya",
<https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya>.

Penulis : Michael Hangga Wismabrata

Editor : Aprillia Ika

C. Landasan Teori

1. Tindakan Manusia

a. Actus Hominis

Tindakan manusia sebagai suatu gerakan belaka, dimana manusia berada pada level yang paling rendah yaitu level vegetatif (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural). *Actus hominis* adalah tindakan fisik yang dimiliki manusia, seperti makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dalam taraf ini tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang, bahkan manusia bertindak persis dengan binatang. Manusia tidak mengedepankan kemanusiaan dalam bertindak, maka penilaian etis pun tidak dapat dikenakan kepadanya.

b. Actus Humanus

Actus Humanus adalah syarat perbuatan moral. Artinya, etika berada dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral adalah perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik atau buruk dan terpuji atau tercela. Selain itu, perbuatan moral berada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. *Actus Humanus* menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional. Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan.

c. Tahu, Mau, Bebas

Kebebasan berarti tidak ada pemaksaan, tapi kebebasan juga menyangkut pilihan – pilihan yang ada didepannya. Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu tahu dan mau. Artinya, hanya apabila manusia itu mengetahui dan menghendaki, ia disebut manusia bebas dan dengan demikian ia bertanggung jawab di atasnya. Kehilangan salah satu syarat ini, manusia tidak dapat bertanggung jawab di atas tindakannya.

2. Hati Nurani Tumpul

Hati nurani berarti hati yang memiliki pengetahuan. Hati nurani adalah hati yang mengetahui maksudnya ialah hati kita memiliki pertimbangan yang membimbing kehendak kita.

Dalam kasus ini, saya mengutip teori hati nurani tumpul yang berarti hati yang kurang peka pada nilai – nilai kebenaran sehingga lama – kelamaan kesetiannya pada nurani menjadi tumpul.

3. Prinsip – Prinsip Refleksif Dari Hati Nurani Yang Benar

Salah satu prinsip refleksif yang saya gunakan dalam pembahasan kasus ini adalah prinsip *Bonum commune bono privato preferri debet*: kepentingan umum lebih penting atau harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi

D. Pembahasan

Miris, kasus korupsi massal di Kota Malang hangat diperbincangkan, karena sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, berstatus tersangka suap. 41 Anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Kasus ini tentunya membuat masyarakat terutama kota Malang khawatir dan cemas karena korupsi dilakukan secara massal. Korupsi massal ini melibatkan pihak legislatif (DPRD) dan pihak eksekutif (kepala daerah). DPRD sebagai legislator mencerminkan bahwa peran legislatif di kota Malang tidak berjalan dengan baik dalam menjalankan pengawasan, anggaran, dan regulasi. Kasus korupsi ini tentunya menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia bahwa korupsi sudah menjadi kebiasaan bagi seorang atau kelompok pejabat. Kasus korupsi massal ini menambah daftar hitam perilaku – perilaku pejabat pemerintahan di Indonesia.

Teori *Actus Hominis* dan *Actus Humanus* menggambarkan apakah manusia itu sama atau beda dengan binatang. Hal yang dijadikan pembeda adalah rasionalitas tindakan manusia tersebut. Merujuk pada teori tersebut, tindakan korupsi massal DPRD Kota Malang mencerminkan bahwa mereka tidak menggunakan akal budi dalam bertindak, selain itu

keputusan yang mereka ambil untuk korupsi menggambarkan bahwa rasionalitas mereka tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar – benar *Actus Humanus*? atau bahkan mereka adalah *Actus Hominis*? Dimana tindakannya sama seperti binatang. Kasus diatas menunjukkan bahwa DPRD Kota Malang tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak, mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk memperkaya diri dengan instan.

Teori lain yang berkaitan dengan tindakan manusia adalah Tahu, Mau, Bebas. Apabila manusia itu mengetahui dan menghendaki, ia disebut manusia bebas dan dengan demikian ia bertanggung jawab diatasnya. DPRD Kota Malang tentunya menge**TAHU**i bahwa korupsi adalah tindakan yang dikategorikan melawan hukum dan merugikan negara, tetapi mereka tidak menggunakan pengetahuannya dengan baik. Walaupun mereka mengetahui korupsi adalah tindakan kejahatan, terdapat pilihan apakah harus melakukannya ataupun menghindarinya. Pilihan yang diambil DPRD Kota Malang adalah **MAU** melakukan korupsi. Hal itu semakin memperkuat argumen bahwa mereka bertindak tanpa mempertimbangkan baik/buruk dan terpuju/tercela. Mereka sudah mengetahui dan menghendaki korupsi, artinya mereka adalah manusia bebas. Namun, apakah mereka bertanggung jawab terhadap tindakannya? Jawabannya adalah **TIDAK** karena mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain. Uraian dari teori tindakan manusia menggambarkan bahwa tindakan mereka mencerminkan mereka termasuk golongan *Actus Hominis*.

Kasus korupsi massal ini tentunya berasal dari hati masing – masing pelaku yang menghendaki untuk melakukannya. Oleh karena itu, permasalahan ini juga dapat dilihat dan dikaitkan dengan teori hati nurani. Dalam pembahasan ini saya menggunakan asas teori hati nurani tumpul. Hati nurani adalah hati yang mengetahui maksudnya ialah hati kita memiliki pertimbangan yang membimbing kehendak kita. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan teori hati nurani tumpul yang

memiliki arti hati yang kurang peka pada nilai – nilai kebenaran sehingga lama – kelamaan kesetiannya pada nurani menjadi tumpul. Dari penjelasan teori tersebut, apakah hati nurani benar – benar mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi? Jika iya, seperti apa hati nurani mereka? Apakah hati nuraninya sudah tumpul?. DPRD Kota Malang mempunyai hati yang kurang peka pada nilai – nilai kebenaran, hati mereka lebih mendorong untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan pihak lain. Mungkin dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah benar – benar tumpul. Hati nurani seperti inilah yang harus diasah agar menjadi runcing dan tidak merugikan negara ataupun pihak lain.

Seperti yang telah dituliskan pada kasus di atas, bahwa DPRD Kota Malang melakukan kasus korupsi massal yang melibatkan kepala daerah. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat tetapi malah mengkhianati rakyat. Karena baru kali ini di Indonesia terutama Kota Malang korupsi dilakukan secara massal dan hanya menyisakan 4 pejabat yang tidak terlibat korupsi dari 45 pejabat.

Sekarang kita kaitkan permasalahan korupsi tadi dengan salah satu prinsip refleksif dari hati nurani yang benar, yaitu *bonum communae bono privato praeferri debet*. Apa itu *bonum communae bono privato praeferri debet* ? pasti kalimat ini masih terdengar aneh di telinga masyarakat. Padahal, sudah selayaknya kita menerapkan kalimat ini di kehidupan bermasyarakat. *Bonum communae bono private praeferri debet* artinya adalah kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Prinsip refleksif ini menekankan agar seluruh manusia di dunia ini lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi, para pelaku tindak korupsi jelas tidak berpedoman pada prinsip refleksif *Bonum communae bono private praeferri debet* ini. Karena dengan mengkorupsi uang rakyat itu sama saja mencuri..

Di Negara lain, seseorang yang mencuri sekecil apapun, hukumannya sangat berat. Bahkan ada yang sampai dipotong tangannya. Di Indonesia?

Seseorang yang mencuri uang rakyat mencapai milyaran atau bahkan trilyunan dipenjara hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Setelah itu mereka bisa bebas kembali. Lalu apa yang bisa membuat para pelaku koruptor itu jera? Bahkan di penjara pun para koruptor itu diberikan fasilitas khusus. Ini mengerikan sebenarnya. Tapi entah kenapa di Indonesia itu hukuman seperti bisa di nego.

Sekarang kembali lagi ke topik mengenai kasus korupsi massal di Kota Malang. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun Kota Malang justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri secara massal. Semestinya, kalau memang pemerintah mengalokasikan dana untuk kepentingan bersama (umum), harus dipertanggung jawabkan secara bijaksana. Kasus tersebut tentunya berdampak signifikan pada perkembangan Kota Malang yang terhambat serta akan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemimpin dan DPRD yang akan menjabat di periode yang akan datang.’ .

Ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Karena sudah semestinya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Bukan malah lebih memiskinkan rakyatnya dengan ‘nyolong’ uang rakyat. Karena bagaimanapun juga kepentingan rakyat adalah yang paling penting dan yang harus diutamakan. Mungkin jika uang itu digunakan dengan semestinya, pasti Kota Malang akan jauh lebih baik dari yang sekarang, dan masyarakat pun juga bisa merasa nyaman dengan fasilitas-fasilitasnya.

Sebenarnya, terkait korupsi massal tersebut, pasti ada pihak-pihak lain yang juga ikut andil dalam tindakan pidana korupsi. Namun oknum-oknum itu tidak sampai terjerat hukum. Ini berarti di Kota Malang masih ada bibit-bibit koruptor merajalela. Terlebih lagi di kota-kota besar yang lainnya. Masih sangat banyak kasus-kasus korupsi yang belum terdeteksi. Berapapun banyaknya uang yang dikorupsi, tetap saja itu namanya ‘nyolong’ (mencuri). Sehingga jangan sampai ada hukum yang memperbolehkan orang ‘nyolong’, sekalipun uang yang dicuri itu

sedikit. Mau jadi apa Negara ini jika ada hukum yang memperbolehkan orang untuk mencuri?

Kita tahu bahwa kasus korupsi tidak sesuai dengan prinsip refleksif *bonum communae bono private praeferri debet* yang telah dijelaskan di atas. Di mana seharusnya para pemerintah lebih mementingkan kepentingan umum (kepentingan bersama) daripada memikirkan keuntungan pribadi, dalam hal ini kepentingan bersama yang dimaksud adalah terkait fasilitas dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Bukan malah mementingkan diri sendiri seperti itu. Itu menyimpang dari prinsip bahwa manusia sudah semestinya lebih mengutamakan kepentingan bersama.

Lalu apa solusinya? Belum ada solusi yang benar-benar seratus persen ampuh untuk mengusir jiwa-jiwa korupsi yang sudah seperti mendarah daging di negeri ini. Bahkan hukum yang ditegakkan pun tidak cukup. Sudah dibentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pun juga belum cukup. Bahkan tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan yang katanya ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pun juga terseret kasus korupsi. Apakah semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia karena para koruptor di negeri ini terlalu ‘dimanjakan’, sehingga sedikitpun tidak membuat jera para pelaku?

Maka, solusi satu-satunya yang dapat menekan angka korupsi di Indonesia adalah dengan menajamkan hati masing-masing. Jangan menunggu nanti. Mulai dari sekarang kita harus belajar untuk selalu mengasah hati kita agar tidak tumpul. Hati yang tajam akan dapat menghalau segala bentuk godaan keburukan, termasuk korupsi. Karena tindak korupsi berawal dari hati yang tumpul. Hati yang tumpul maksudnya di sini adalah seseorang yang mengabaikan kebaikan karena tergoda oleh keburukan. Hati bisa tumpul karena tidak pernah di asah (dilatih) untuk tetap bisa bertahan dalam melakukan kebaikan, sekalipun banyak godaan untuk berbuat kejahatan.

Selain itu, perlu partisipasi dari masyarakat untuk terus mengkritik kerja para pejabat, entah itu gubernur, wali kota, ketua kpk, kepala

sekolah, anggota dewan, dan lain sebagainya. Namun tentu saja dengan kritik yang bersifat membangun, sehingga kinerja para pejabat itu bisa lebih baik lagi. Gerakan masyarakat anti korupsi yang harus dibiasakan sejak dini juga perlu di terapkan. Terlebih untuk para generasi muda penerus bangsa. Jiwa anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar bisa menjadi karakter yang akan terus dipegang teguh hingga mereka dewasa dan terjun ke dunia karir.

Gerakan masyarakat anti korupsi benar-benar perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas. Karena selama ini pemberantasan korupsi dipandang hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa adanya realisasi dari pihak yang bersangkutan. Bayangkan saja, jika uang rakyat terus digerogeti oleh para oknum yang disebut ‘ pejabat’ ,lalu apa jadinya rakyat miskin yang lebih berhak atas uang yang dikorupsi itu? Bukan malah menjadi lebih sejahtera, tapi malah menjadi lebih miskin.

E. Kesimpulan

Tindakan korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan wewenang yang dimiliki maupun kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus korupsi massal yang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang semakin memperburuk citra pejabat pemerintahan di Indonesia. Semakin merajalelanya korupsi di Indonesia, maka hal ini perlu menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan harus ada hukum yang tegas agar pelaku korupsi benar – benar di jera.

Tindakan korupsi dilihat dari sudut pandang tindakan manusia:

1. Teori *Actus Hominis* dan *Actus Humanus* menggambarkan apakah manusia itu sama atau beda dengan binatang. Tindakan korupsi bukanlah tindakan manusia berdasarkan kemanusiaan, tindakan

tersebut tidak mencerminkan manusia sebagai *Actus Humanus*, bahkan manusia bertindak sama seperti binatang (*Actus Hominis*).

2. Tahu, Mau, Bebas. Apabila manusia itu mengetahui dan menghendaki, ia disebut manusia bebas dan dengan demikian ia bertanggung jawab di atasnya. Pelaku korupsi massal Kota Malang mengathui bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan yang sangat dilarang oleh hukum. Tetapi, mereka mau melakukannya karena ingin memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Mereka sudah mengetahui dan menghendaki korupsi, harusnya mereka bertanggung jawab di atasnya, tetapi faktanya tidak. Merak hanya mengedepankan keuntungan diri sendiri.
3. Hati nurani tumpul yang berarti hati yang kurang peka pada nilai – nilai kebenaran sehingga lama – kelamaan kesetiannya pada nurani menjadi tumpul. DPRD Kota Malang mempunyai hati yang kurang peka pada nilai – nilai kebenaran, hati mereka lebih mendorong untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan pihak lain. Mungkin dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah benar – benar tumpul. Hati nurani seperti inilah yang harus diasah agar menjadi runcing dan tidak merugikan negara ataupun pihak lain.
4. Pinsip *Bonum communae bono privato preferri debet*: kepentingan umum lebih penting atau harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Korupsi massal yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip diatas, karena mereka hanya ingin menguntungkan diri sendiri/kelompok, mereka mengabaikan kepentingan umum terutama masyarakat Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).